BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan di pasar bebas merupakan wadah baru bagi para pelaku usaha khususnya bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena transaksi jual beli tersebut dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Namun, berdagang di pasar bebas masih banyak terjadi kemudharatan yang ditimbulkan seperti monopoli harga. Karena tanpa terkecuali hampir semua perekonomian terlibat perdagangan internasional.¹ Oleh karena itu, masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan tantangan yang tidak ringan bagi usaha mikro kecil.² Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum mengenai permasalahan tersebut agar pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul bisa bersaing di pasar bebas sesuai dengan prinsip syariah.

Mengetahui permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditengah Pasar Bebas Perspektif *Maqashid Syariah* Studi Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini hanya fokus pada konsep *maqashid syariah* menurut al-Syatibi. Karena dalam konsep tersebut kemaslahatan merupakan unsur terpenting yang mana diwujudkan dalam lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

¹Norman Gemmel, *Ilmu Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1994), h. 13.

²Ina Primina, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 37.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai usaha mikro kecil dan menengah perspektif *maqashid syariah*. Manfaat praktis, dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi hukum bisnis syariah.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari.³
2. Pelaku UMKM adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan

³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 2.

ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.⁴

3. Pasar bebas adalah kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang dengan harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan (*free market*).⁵
4. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Minasri, tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
2. Penelitian Ari Ratna Kurniastuti, tentang *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*.
3. Penelitian Fauzia Pradipta, tentang *Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia*.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan hukum

⁴Mukti Fajar, "Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Makalah*, disajikan dalam Seminar Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 26 April (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013), h. 1.

⁵Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 129.

⁶Arif Wibowo, "Maqashid asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah," *Islamic Finance*, 4 (Februari, 2012), h.1.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan melalui hukum administrasi Negara, hukum pidana dan hukum perdata.

2. Pemberdayaan UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 1 angka 1 sampai 3 dibagi menjadi tiga yaitu⁸:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau, memiliki hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31.

⁸ Pasal 1 angka 1 sampai 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

3. Pasar Bebas

Pasar bebas merupakan pasar dimana harga barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui para penjual dan pembeli, ditetapkan umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran dan permintaan. Dari sudut ekonomi, dengan demikian barang atau komoditas tidak saja harus mampu bersaing dipasar dalam negeri, tetapi juga harus mampu bersaing dalam negeri dan di pasar negara lain.⁹

4. Maqashid Syariah

Al-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.¹⁰

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-

⁹Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 120.

¹⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, h. 65.

gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

D. Sumber Data

- a. Data primer, berupa narasumber dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.
- b. Data sekunder, berupa literatur yang terkait dengan penelitian diantaranya *maqashid syariah* menurut konsep al-syathibi, dan kajian mengenai perlindungan hukum bagi UMKM.
- c. Data tersier, adalah data penunjang untuk menyempurnakan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode wawancara, yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian.¹³

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

¹³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 106.

- b. Metode dokumentasi, mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan praktik perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam menghadapi perdagangan di pasar bebas.

F. Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*.

G. Keabsahan Data

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, dan triangulasi dengan teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Perkembangan dan semakin banyaknya para pengrajin kayu tentu membuat berbagai dinamika yang terjadi, baik itu kompetisi antar pengrajin yang tidak sehat seperti melakukan banting harga dan persaingan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung (P2BKKT) yang berdiri sejak tanggal 9 Juli 2003. Sekretariat di jalan Sawunggaling RT. 2 RW. 1 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Adanya P2BKKT memiliki tujuan agar penjualan produk berasal dari satu pintu, sekaligus untuk menstabilkan harga dan tidak dipermainkan tengkulak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sentra industri kerajinan kayu.

Namun, dengan adanya paguyuban tersebut tidak serta merta semua permasalahan yang dihadapi para pengrajin dapat terselesaikan. Salah satunya persaingan dalam memperebutkan akses pemasaran, karena hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah usaha. Dengan demikian, tidak heran jika para pengrajin tersebut melakukan berbagai cara untuk dapat meningkatkan usahanya salah satunya monopoli harga. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan bagi para pengrajin tersebut agar dapat bersaing secara sehat.

2. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*

Apabila para pelaku usaha sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka harus ada campur tangan dari pemerintah dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya monopoli harga dan menghindari dari kecurangan para pelaku usaha tersebut. Menaikkan harga boleh dengan dua syarat:¹⁴

1. Menaikkan harga untuk kebutuhan yang bersifat umum mencakup seluruh masyarakat.
2. Kenaikkan harga karena barang yang ada sedikit atau banyaknya permintaan.

Apabila dua syarat terealisasi, maka hal tersebut merupakan keadilan dan merupakan satu bagian dari memperhatikan kepentingan umum.

Maqashid syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Dalam melakukan tindakan ekonomi akan memiliki *mashlahah* yang lebih besar dan yang lainnya memiliki *mashlahah* yang lebih kecil,

¹⁴Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, h. 346.

tergantung pada perhatian perbuatan ekonomi tersebut dalam mempertimbangkan kelima unsur pokok kehidupan. Tindakan ekonomi yang menjaga kelima unsur tersebut akan memiliki *mashlahah* yang lebih besar daripada tindakan ekonomi yang hanya berfungsi sebagai penghias kelima unsur tersebut. Dengan demikian, konsep *mashlahah* merupakan konsep yang objektif terhadap aktivitas ekonomi karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*) syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar berupa Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung (P2BKKT) yang mana hanya sebatas dalam proses produksi saja, sedangkan dalam pemasaran hasil produksinya mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga telah terjadi persaingan yang tidak sehat dengan melakukan monopoli harga. Hal ini yang mengakibatkan para pelaku usaha tersebut tidak dapat bersaing di pasar global dan tidak dapat mengembangkan usahanya, hal ini sangat merugikan para pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tersebut mendapatkan perlindungan hukum maka mereka dapat meningkatkan kualitas usahanya baik di Indonesia maupun dunia.
2. Dalam konsep *maqashid syariah* perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas sangat diperlukan karena untuk kemaslahatan mereka agar mereka terhindar dari monopoli harga dan persaingan yang tidak sehat. Hukum dari perlindungan tersebut boleh dengan syarat tidak menghilangkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi tersebut. Selain itu, syariat ditegakkan atas dasar kemudahan dan meniadakan kesulitan dari kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Bagi pelaku usaha, seharusnya dalam melakukan transaksi perdagangan khususnya di pasar bebas harus sesuai dengan prinsip syariah, agar mereka terhindar dari monopoli harga dan persaingan yang tidak sehat.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya sosialisasi dan pengawasan secara maksimal terhadap para pelaku usaha khususnya di Kelurahan Tanggung. Serta diharapkan dapat membantu dalam hal permodalan, alat produksi, dan pelatihan manajemen produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*. Terjemahan oleh Thahirin Suprpta, M. Faisal dan Adis Aldizar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Fazlurrahman. *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Hadjon, Philipus M.. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1987.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral, Oskar. *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.